



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 005.03.2.099170/2025**



DS:4430-8720-5358-6601

Revisi ke 09

Tanggal : 08 November 2025

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
2. Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
3. Provinsi : (06) ACEH
4. Kode>Nama Satker : (099170) PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH
- Sebesar : Rp. 331.399.000 (TIGA RATUS TIGA PULUH SATU JUTA TIGA RATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.04 PERADILAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

005.03.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
005.03.BF.1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Jumlah Uang

Rp. 331.399.000
Rp. 331.399.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	331.399.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN BANDA ACEH (001) Rp. 331.399.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099170/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:4430-8720-5358-6601

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (06) ACEH
Kode>Nama Satker : (099170) PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH

Halaman : I A. 1

Program	: 005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	331.399.000
Kegiatan	: 1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	331.399.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi penyelesaian perkara perdata tepat waktu pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan umum	
	: 2. 01	Jumlah Perkara di Lingkungan Peradilan Umum di Tingkat Banding Yang diselesaikan Tepat Waktu	
	: 3. 01	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara dilingkungan Peradilan Umum	
	: 4. 02	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi penyelesaian perkara perdata tepat waktu tingkat pertama di lingkungan peradilan umum	
	: 5. 02	Jumlah Perkara di Lingkungan Peradilan Umum di Tingkat Pertama Yang diselesaikan Tepat Waktu	
	: 6. 02	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung dilingkungan Peradilan Umum	
	: 7. 03	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju di lingkungan peradilan umum	
	: 8. 04	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	
	: 9. 05	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi pengiriman petikan/pemberitahuan isi putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	
	: 10. 06	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	
	: 11. 07	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan di lingkungan peradilan umum	
	: 12. 08	Jumlah Pelaksanaan Penyelesaian Permohonan eksekusi putusan perdata pada lingkungan peradilan umum	
	: 13. 09	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi perkara yang berhasil diputus dengan pendekatan keadilan restoratif di lingkungan peradilan umum	
	: 14. 10	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi penyelesaian perkara yang berhasil melalui mediasi	
	: 15. 11	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi penyelesaian perkara anak yang berhasil melalui diversi	
	: 16. 12	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelesaian perkara perdata yang menggunakan e-Court	
	: 17. 13	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	
	: 18. 14	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi layanan perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	
	: 19. 15	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi upaya hukum banding perkara perdata di pengadilan yang menggunakan e-Court	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099170/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:4430-8720-5358-6601

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (06) ACEH
Kode>Nama Satker : (099170) PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH

Halaman : I A. 2

Klasifikasi Rincian Output	1	:	1049.AEA	Koordinasi	6,00	kegiatan	86.430.000
Rincian Output		:	01	AEA.001 Pembinaan dan Pengawasan Aparatur Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	6,00	kegiatan	86.430.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan	449,00	Perkara, Berkas Perkara	132.889.000
Rincian Output		:	01	BCA.U03 Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di wilayah Barat	378,00	Perkara	99.874.000
		:	02	BCA.U04 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Barat	64,00	Perkara	28.446.000
		:	03	BCA.U05 Perkara PHI (dibawah 150 juta) yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di wilayah Barat	7,00	Perkara	4.569.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	1049.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	200,00	Orang	48.000.000
Rincian Output		:	01	QBA.032 Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum	200,00	Orang	48.000.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	1049.QCA	Perkara Hukum Perseorangan	184,00	Perkara, Berkas Perkara	64.080.000
Rincian Output		:	01	QCA.001 Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	4,00	Perkara	1.440.000
		:	02	QCA.002 Sidang di luar Gedung Pengadilan	180,00	Perkara	62.640.000

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099170/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



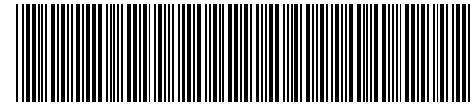
DS:4430-8720-5358-6601

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (06) ACEH
Kode>Nama Satker : (099170) PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
099170	PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH	-	331.399	-	-	-	331.399		
005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	331.399	-	-	-	331.399		
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-	331.399	-	-	-	331.399		
1049.AEA	Koordinasi (06.51 ACEH / KOTA BANDA ACEH)	-	86.430	-	-	-	86.430	06 . 51	
01	RM	-	86.430	-	-	-	86.430	001	
1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan (06.51 ACEH / KOTA BANDA ACEH)	-	132.889	-	-	-	132.889	06 . 51	
01	RM	-	132.889	-	-	-	132.889	001	
1049.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan (06.51 ACEH / KOTA BANDA ACEH)	-	48.000	-	-	-	48.000	06 . 51	
01	RM	-	48.000	-	-	-	48.000	001	
1049.QCA	Perkara Hukum Perseorangan (06.51 ACEH / KOTA BANDA ACEH)	-	64.080	-	-	-	64.080	06 . 51	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099170/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:4430-8720-5358-6601

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (06) ACEH
Kode>Nama Satker : (099170) PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	RM	-	64.080	-	-	-	64.080	001@	
JUMLAH		-	331.399	-	-	-	331.399		

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099170/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:4430-8720-5358-6601

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (06) ACEH
Kode>Nama Satker : (099170) PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH

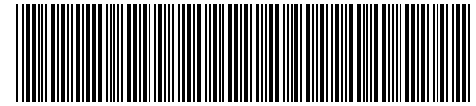
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	099170	PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	33.983	19.718	27.030	21.602	16.177	41.083	48.870	32.600	29.173	28.533	32.629	331.399
		BELANJA BARANG	0	33.983	19.718	27.030	21.602	16.177	41.083	48.870	32.600	29.173	28.533	32.629	331.399
	005.03.BF.1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	0	33.983	19.718	27.030	21.602	16.177	41.083	48.870	32.600	29.173	28.533	32.629	331.399
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	33.983	19.718	27.030	21.602	16.177	41.083	48.870	32.600	29.173	28.533	32.629	331.399
		PERKIRAAN PENERIMAAN	4.474	4.474	4.474	4.474	4.474	4.474	4.474	4.474	4.474	4.474	4.474	4.493	53.707
		- PNB (425231)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	20
		- PNB (425232)	392	392	392	392	392	392	392	392	392	392	392	398	4.710
		- PNB (425233)	1.187	1.187	1.187	1.187	1.187	1.187	1.187	1.187	1.187	1.187	1.187	1.188	14.245
		- PNB (425239)	2.894	2.894	2.894	2.894	2.894	2.894	2.894	2.894	2.894	2.894	2.894	2.898	34.732

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099170/2025
IV A. B L O K I R**



DS:4430-8720-5358-6601

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [03] Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : [06] ACEH
Kode dan Nama Satker : [099170] PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH

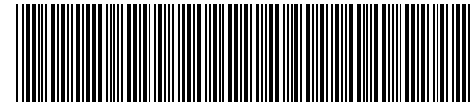
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN		KODE	URAIAN
099170	PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH			
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan	Rp.	450	
	52 Belanja Barang	Rp.	450	
005.03.BF 1049	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Peningkatan Manajemen Peradilan Umum			
1049.QCA	Perkara Hukum Perseorangan			
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	450	
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara			

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099170/2025
IV B. C A T A T A N**



DS:4430-8720-5358-6601

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [03] Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : [06] ACEH
Kode dan Nama Satker : [099170] PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002